

**PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
TERHADAP AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN**

ARTIKEL

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

RIO RIZKITA DHARMA
2009/98668

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN

Oleh:

RIO RIZKITA DHARMA
98668/2009

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode
September 2014 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, September 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

Pembimbing II



Navang Helmayunita, SE, M.Sc.
NIP. 19860127 200812 2 001

**PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
TERHADAP AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
KOTA PARIAMAN**

Rio Rizkita Dharma

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof.Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : riorizkita18@yahoo.com

ABSTRACT

This study was aimed to determine the effect of (1) functional supervising , and (2)accounting system toward the accountability of govermental institution.

The research is causative. The population were all working units (SKPD) in Pariaman City regency. Technique in taking sampling was a total sampling method and obtained 27 SKPDs. Type of data used was subject data and the data source used was primary data. Data collection method used was by using questionnaires. The analysis used was multiple regression analysis.

The result shows that functiona supervising significantly give positive effect to the accountability of govermental institution and the impemetation accounting system doesn't significantly influence the accountability of govermental institution .

Key words : functional supervising, accounting system, the accountability of govermental institution .

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh pengawasan fungsional, dan (2) penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas instansi pemerintah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja a Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Pariaman. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode *total sampling* dan di peroleh 27 SKPD. Jenis data yang digunakan adalah data subyek, dan sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang di gunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas instansi pemerintah, dan penerapan sistem akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah.

Kata kunci : pengawasan fungsional, penerapan sistem akuntansi, akuntabilitas instansi pemerintah

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good government*) pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakkan citra pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang sampai saat ini dianggap masih sangat rendah. Sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), disebutkan bahwa azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi: Azas Kepatuhan Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas.

Pengembangan kebijakan akuntabilitas di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh dua hal penting, yaitu: pertama, adanya tuntutan internal (masyarakat Indonesia) antara lain agar sektor publik semakin transparan dan mampu mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan yang ditujukan untuk menyelesaikan dan memenuhi tuntutan publik. Kedua, adalah tuntutan perubahan dalam lingkungan global dalam hal manajemen sektor

publik misalnya tuntutan *Good Governance* dan *Performance Management*.

Berkaitan dengan hal tersebut, telah diterbitkan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang intinya mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada aparatur pemerintah. Di mana tugas pokok aparatur pemerintah, yaitu sebagai abdi negara dan sebagai abdi masyarakat, dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan pembangunan serta tugas pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengayoman serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan manajemen modern yang meliputi perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja yang didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing, merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Akuntabilitas instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic.

Menurut Prof. Miriam Budiardjo, akuntabilitas didefinisikan sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat kepada mereka yang memberi mandat itu. Jadi, akuntabilitas memang sebuah pertanggungjawaban yang perlu dibarengi dengan pengawasan terhadap pihak-pihak yang diberi amanah. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh pihak luar seperti media, yang punya peranan cukup penting bagi terciptanya akuntabilitas suatu instansi.

Akuntabilitas yang memadai merupakan pertanggungjawaban yang dibarengi dengan pengawasan yang baik, terstruktur, terdapat sanksi yang tegas apabila dilanggar, dan mengikat pekerja di instansi tersebut. Pengawasan fungsional merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah

maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah (Sadu Wasistiono,2010).

Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya sistem akuntansi yang usang dan tidak akurat akan menghancurkan sendi-sendi partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas (Aribowo, 2007). Penerapan sistem akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan instansi pemerintah yang baik. Hal yang paling mendasar dan penting dari penerapan akuntansi salah satunya adalah sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian sistem akuntansi keuangan pemerintah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi.

Rendahnya akuntabilitas instansi pemerintah di Indonesia selama ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah maraknya praktek *fraud* yang terjadi diberbagai instansi Pemerintah. Menurut Theft Act 1968, salah satu jenis praktek *fraud* adalah korupsi (Jones, 1990). Praktek korupsi dalam pemerintah tersebut telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di kawasan Asia Tenggara dan dunia (www.transparency.org). Selain itu, kurangnya ketaatan dan kepedulian atas penerapan sistem

akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku juga termasuk ke dalam faktor yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas instansi pemerintah, hal ini banyak terjadi di daerah-daerah, salah satunya terjadi pada salah satu kota yang merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Barat yaitu kota Pariaman. Pada tahun 2011 juga terdapat temuan oleh BPK RI, dimana dalam penyelesaian tindak lanjut atas pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Kota Pariaman, telah terjadi peningkatan penyelesaian tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi dan telah dapat disetorkan uang ke kas daerah sebesar Rp 166.533.590,- (Seratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) serta Rp57.200.000,- (Lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke Kas Negara. Tingkat kesadaran SKPD dalam menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan cukup tinggi dengan semakin menurunnya tunggakan temuan yang belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengawasan Fungsional Dan Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah kota Pariaman”**.

2. TELAHAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggungjawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006:83). Menurut Mardiasmo (2006:3), Akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam BPKP (2007) Akuntabilitas Instansi Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan :

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang diantaranya dengan penetapan perencanaan strategik pada instansi pemerintahan.
2. Indikator keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. *Output* dapat berupa pengukuran terhadap kinerja instansi pemerintahan.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* ini merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. *Outcomes* dapat berupa pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja pada instansi pemerintahan.
4. Indikator dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan

umum lainnya yang dimulai oleh pencapaian kinerja setiap indikator suatu kegiatan. Dengan memanfaatkan informasi yang dihasilkan untuk memperbaiki kinerja secara berkesinambungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas

Menurut Sjamsiar Sj (2006) dalam bukunya “Akuntabilitas Konsep dan Implementasi, banyak faktor yang menyebabkan terhambatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian visi dan misi dalam pemerintahan, beberapa diantaranya yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, tidak dipatuhinya hukum sehingga *enforcement*-nya sangat lemah, kurangnya pengawasan fungsional yang dilakukan oleh pemerintah serta kurangnya sistem akuntansi yang menunjang kegiatan pelaporan keuangan pemerintah.

Akuntabilitas dalam konteks organisasi sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. Teori keagenan beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak *agent* (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah

yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh *agent* (pemerintah).

Didalam teori keagenan yang dilakukan oleh para ahli penelitian (lihat Thompson dan Jones, 1986; McCubbins et al., 1987; Christensen, 1992; Lupia, 2001; dan Fozzard, 2001) telah mengelompokkan keterkaitan akuntansi sektor publik dalam pencapaian akuntabilitas instansi pemerintahan dengan adanya beberapa faktor pendukung dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, yakni dengan adanya hubungan sistem pengawasan, informasi asimetri, sistem akuntansi dan sistem insentif antara eksekutif dan legislatif.

Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional merupakan bagian penting dalam praktik pengawasan di Indonesia. Adapun fungsi atau peranan dari pengawasan fungsional adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Menurut Ihyaul Ulum (2009), Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.

Pengawasan atau penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aparatur pengawasan fungsional dibentuk oleh pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 44 tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2009 menjelaskan bahwa aparat yang melaksanakan pengawasan fungsional dalam lingkungan internal pemerintah daerah adalah

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
2. Inspektorat jenderal Departemen, Aparat Pengawas Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Instansi Pemerintah lainnya.
3. Inspektorat Wilayah Propinsi, Kabupaten / Kota.

Penerapan Sistem Akuntansi

Menurut Narko (2007:3), pengertian sistem akuntansi adalah

jaringanyangterdiridariformulir-formulir,catatan-catatan,prosedur-prosedur,alat-alat,dansumberdayamanusiadalamrangka menghasilkaninformasipadasuatuorganisasiuntuk keperluanpengawasan, operasi, maupun untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis bagi pihak-pihakyangberkepentingan.

Sedangkan Sistem akuntansi menurut Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2001:3), sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang memudahkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Menurut Azhar Susanto (2008:52) sistem akuntansi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna.

Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pengelolaan kegiatan perusahaan dan kepada pihak-pihak tertentu yang memerlukan informasi akuntansi untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem akuntansi sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mengelola keuangan organisasi, akuntansi juga pada dasarnya

merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi.. Sistem akuntansi membutuhkan suatu proses penyusunan laporan selanjutnya yang akan digunakan sebagai alat komunikasi untuk keperluan manajemen, baik keperluan intern maupun keperluan ekstern suatu organisasi.

Unsur-unsur Sistem Akuntansi

Secara garis besar, unsur suatu sistem akuntansi pokok menurut Mulyadi (2001) adalah formulir, catatan yang terdiri jurnal, buku besar dan buku pembantu serta laporan. Berikut ini akan diurai lebih jelas mengenai unsur-unsur dari sistem akuntansi tersebut diantaranya:

a. Formulir

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen karena dengan formulir, peristiwa yang terjadi dalam organisasi didokumentasikan.

b. Jurnal

Merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan serta meringkas data keuangan serta data lainnya. Dalam jurnal ini data keuangan pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan

disajikan dalam pelaporan keuangan serta terdapat kegiatan peringkasan data

c. Buku besar

Buku besar atau *general ledger* terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang sebelumnya telah dicatat ke dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai unsur informasi yang diperlukan untuk disajikan dalam laporan keuangan.

d. Buku pembantu

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (*Subsidiary Ledger*). Buku pembantu atau *Subsidiary Ledger* terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar.

e. Laporan

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang berisi tentang informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laba ditahan, laporan harga

pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, dan daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif.

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Keuangan dan Staf Bagian keuangan pada 27 SKPD di kota Pariaman. Jenis data dalam penelitian ini ialah data subjek. Sumber data dalam penelitian ini primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebar kuesioner. Pengukuran variabel menggunakan skala likert, sesuai dengan pengukuran yang telah dikembangkan oleh peneliti terdahulu.

Uji coba kuesioner yang akan dilakukan peneliti, dilakukan pada mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Padang yang sudah mengambil mata kuliah Akuntansi sektor publik yang berjumlah 30 orang. Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan tersebut benar-benar valid (sahih) dan reliabel (handal). Untuk Uji validitas ini digunakan

bantuan software SPSS versi 16. Setelah dilakukan pengujian validitas, selanjutnya akan dilakukan pengujian reliabilitas, yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten.

Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas residual, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan metode analisis menggunakan analisis regresi berganda, uji F, koefisien determinasi (*adjusted R²*) dan uji T.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

Uji Validitas

Untuk instrumen pengawasan fungsional diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,499, instrumen sistem akuntansi nilai terkecil 0,461 dan untuk instrumen akuntabilitas dengan nilai terkecil sebesar 0,344.

Uji Reliabilitas

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel di atas yaitu untuk instrumen pengawasan fungsional 0,842, instrumen sistem akuntansi 0,821, dan untuk instrumen akuntabilitas 0,831. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran diatas 0,8 sehingga semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dari Tabel hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,948 dengan signifikan 0,330. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian dinyatakan berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut

Uji Multikolonearitas

Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam Tabel menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Tabel dapat dilihat tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel Abs. Tingkat signifikansi $> \alpha$ 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

HASIL PENELITIAN

Metode Estimasi Regresi

Dari hasil pengolahan data SPSS, didapat nilai *sig* sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga model regresi yang dipakai dapat digunakan. Dari tabel dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 18,980 + 0,803 (X_1) + 0,058 (X_2)$$

Dimana:

Y = Akuntabilitas Instansi Pemerintah

X₁ = Pengawasan Fungsional

X₂ = Penerapan Sistem Akuntansi

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

Nilai konstanta

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 18,980 yang berarti bahwa jika variabel akuntabilitas instansi pemerintah adalah nol (0),

Koefisien regresi (b) X₁

Nilai koefisien variabel X₁ yaitu pengawasan fungsional sebesar 0,803 ini berarti bahwa dengan meningkatnya pengawasan fungsional satu satuan, maka akan meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah sebesar 0,803 satuan dan bentuk pengaruh X₁ terhadap Y adalah positif.

Koefisien regresi (b) X₂

Nilai koefisien variabel X₂ yaitu penerapan sistem akuntansi sebesar $-0,058$ ini berarti bahwa dengan meningkatnya penerapan sistem akuntansi satu satuan maka tidak akan meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah sebesar $-0,058$ satuan.

Uji Model

Uji F (*F-test*)

Untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan untuk menunjukkan F_{hitung} yaitu sebesar 6,997 dan nilai signifikan pada 0,002 ($< 0,05$). Hal ini berarti menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah *fix*.

$F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $sig < \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah *fix*.

Adjusted R Square

Berdasarkan hasil *output* diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,214 atau 21,4%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji t (*t-test*)

Uji t statistik (*t-test*) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 21, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini :

Pengaruh Pengawasan Fungsional (X₁) berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Pengujian hipotesis pertama di lakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel.

Hipotesis

diterima jika thitung > ttabel atau nilai sig < α 0,05.

Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,002 < \alpha$ 0,05 dan nilai t hitung $2,935 > t$ tabel.

Nilai koefisien β dari variabel X1 bernilai positif yaitu 0,803. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan

sesuai dengan hasil penelitian sehingga H1 dapat diterima. Dimana semakin baik pengawasan fungsional maka semakin baik pula akuntabilitas

instansi pemerintah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa

pengawasan fungsional (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas instansi

pemerintah

Penerapan Sistem Akuntansi (X₂) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi berpengaruh

signifikan positif terhadap akuntabilitas instansi pemerintah. Berdasarkan tabel 19 diketahui bahwa

penerapan sistem akuntansi memiliki nilai sig. $0,862 > 0,05$ dengan koefisien β adalah -0,058

dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi tidak berpengaruh

signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah, Ini berarti H2 **ditolak**.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan fungsional memiliki hubungan yang positif serta pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah. Dimana pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah. Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam visi dan misi pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surya (2004) yang menunjukkan adanya hubungan yang positif dan pengaruh yang signifikan antara pengendalian intern terhadap penerapan akuntabilitas. Serta didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Cici Rahayu (2011) yang menguji pengaruh audit kinerja dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi, yang menunjukkan bahwa audit kinerja dan pengawasan fungsional secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap

akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori yang dinyatakan oleh Sjamsiar (2006), bahwa pengawasan fungsional merupakan bagian terpenting dalam praktik pengawasan di Indonesia yang mempunyai peranan untuk melakukan pengevaluasian serta memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan agar cita-cita untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dapat dicapai. Karena akuntabilitas merupakan syarat penting dalam terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik, demokratis dan amanah.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sistem akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2004) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang besar penerapan sistem akuntansi terhadap bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintahan, dan penelitian yang dilakukan oleh Ari Wibowo (2007) yang menyatakan bahwa akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang

menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas, artinya penerapan sistem akuntansi saja belum dapat meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah sesuai dengan rencana dan aturan perundang-undangan. Alasan lain tidak signifikannya penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas instansi pemerintah menunjukkan adanya faktor pendukung lain dalam sistem akuntansi yang mendorong meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Besar kecilnya penerapan sistem akuntansi dalam instansi pemerintah tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap akuntabilitas instansi tersebut apabila tidak diiringi dengan SDM yang berkualitas dalam melaksanakan dan menggunakan sistem akuntansi tersebut. Selain itu sistem akuntansi yang usang dan tidak akurat akan dapat menghancurkan pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel. Karena tujuan dari penerapan sistem akuntansi adalah menyediakan informasi dan memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengetahui mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasi, memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reliability*)

informasi dalam menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban aset perusahaan sehingga laporan keuangan lebih akuntabel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pengaruh pengawasan fungsional dan penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas instansi pemerintah daerah kota Pariaman. Berdasarkan hasil penelitian dan uji hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas instansi pemerintah.
2. Penerapan sistem akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah.

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu direvisi peneliti selanjutnya, antara lain :

1. Penelitian ini hanya dilakukan di daerah kota Pariaman.
2. Terbatasnya jumlah data yang diolah karena tidak Semua SKPD yang bersedia menerima dan mengembalikan kembali kuesioner yang dibagikan, sedangkan jumlah populasi yang tidak

begitu besar akan mempengaruhi hasil penelitian.

3. Data penelitian ini diperoleh dari persepsi responden yang disampaikan secara tertulis melalui instrumen kuesioner. Hal ini sangat mempengaruhi validitas hasil, karena jawaban yang diberikan belum tentu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Persepsi responden akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara. Namun apabila penelitian dilakukan melalui wawancara maka akan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan responden yang diteliti banyak.
4. Masih adanya sejumlah variabel lain yang tidak digunakan dan memiliki kontribusi yang besar dalam mempengaruhi akuntabilitas instansi pemerintah

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel penelitian lain dalam penelitian ini. Misalnya variabel audit kinerja, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.
2. Bagi peneliti selanjutnya juga dapat memperluas penelitian ini dengan objek penelitian diberbagai kabupaten dan kota lain yang berbeda sehingga dapat menghasilkan kesimpulan penelitian dengan cakupan yang lebih luas.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian ini dengan menambah jumlah sampel yang lebih besar pada daerah lain.
4. Bagi Instansi Pemerintah daerah, dapat menjadi masukan tentang pentingnya pengawasan fungsional dan penerapan sistem akuntansi yang baik terhadap akuntabilitas instansi pemerintahan.
5. Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan referensi dan menjadi perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hilmi. 2005. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada kabupaten dan Kota di daerah Istimewa Yogyakarta)*. KOMPAK.No.13, Januari-April 2005 Hal: 37-67.
- Andyani, Nurul. 2008. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Universitas Widyatama, Skripsi
- Aribowo, Fajar. 2007. *Laporan Keuangan Daerah Perlu Akuntabilitas*. Harian Bisnis Indonesia.19 November 2007.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar Susanto. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Gramedia
- Bergman, Michael and Jan-Erik Lane. 1990. Public policy in a principal-agent framework. *Journal of Theoretical Politics* 2(3): 339-352.
- BPKP, 2007. *Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP*, edisi kelima (tersedia pada <http://www.bpkp.go.id>).[15/5/2011]
- BPK RI. 2008. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Untuk Tahun Anggaran 2007*. Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan BPK RI di Pekanbaru.
- Christensen, J. G. 1992. Hierarchical and Contractual Approaches to Budgetary Reform. *Journal of Theoretical Politics*. 4(1): 67-91.
- Darma, E. S, 2004, “*Pengaruh Kejelasan Anggaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah*”, Simposium Nasional Akuntansi VII, IAI, 2004

- Dwiyanto, Agus, dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit PSKK-UGM
- Fozzard, A. 2001. *The Basic Budgeting Problem: Approaches to Resource Allocation in The Public Sector and Their Implications for Pro-Poor Budgeting*, Overseas Development Institute, London.
- Ghozali, Imam. 2006. “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”. Semarang : Badan Penerbit Undip
- Halim, Abdul, *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN, 2001.
- Inpres No. 7 Tahun 1999, *Tentang Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Jones, P dan J.Bates. 1990. *Public Sector Auditing: Parctical Techniques For An Integrated Approach*, London: Chapman and Hall
- Kasim, Azhar. 2009. Sistem Pengawasan Internal dalam Administrasi Negara Indonesia, makalah disampaikan dalam seminar nasional “Pengawasan Nasional dalam Sistem Pemerintahan Presidensial: memperkuat Fungsi Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah dalam Era Pemerintahan Baru”. Jakarta : FHUI.
- Kevin Lane Keller., 2003, *Strategic Brand Manajemen*, Second Edition, Prentice Hall
- LAN, BPKP. 2000. *Pengukuran kinerja instansi pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Lane. (2000). Jilid 1 (*Marketing Management, Twelfth Edition*). Terj. Benyamin
- La Midjan, dan Azhar Susanto. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi 1*. Edisi Keenam: Lembaga Informasi Akuntansi
- Lupia, Arthur. *Delegation of Power: Agency Theory*, dipublikasikan di Neil J. Smelser; dan Paul B. Baltes, 2001, (eds.), *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, 5: 3375-3377, Elsevier Science Limited, Oxford, UK.
- Lembaga Adminstrasi Negara. 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Mardiasmo. 2003 *Perpajakan* edisi revisi, Yogyakarta, Andi
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Andi.
- McCubbins, M. D.; R. G. Noll; dan B. R. Weingast. 1987. *Administrative Procedure as Instruments of Political Control*. *Journal Law, Economic and Organization*. 3: 243-79.

- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Mohammad, Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPF: Yogyakarta
- Moe, Terry M.. 1984. The New Economics of Organizations. *American Journal of Political Science*. 28(4): 739-77.
- Narko. 2007. *Sistem Akuntansi*. Yayasan Pustaka Nusatama. Yogyakarta.
- Nurhayati, Isnaeni. 2004. *Pengaruh penerapan SAI dan SAKIP terhadap kelayakan penyajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran*. UNPAD, Tesis.
- Nurkhamid, Muhammad. 2008. Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 3, No. 1, 45-76.
- Nusantoro, Sunarno Agus. 2009. Efektivitas Penerapan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Di Kabupaten Tasikmalaya. Thesis pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (MPKP FEUI).
- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui (www.google.com) [09/12/2012]
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2009. Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui (www.google.com) [06/06/2013]
- Peraturan Pemerintahan No 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) pengertian dari Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- Pekbis Jurnal, Vol.3, No.3, November 2011: 560-568 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu) Reynaldi Riantiarno & Nur Azlina.
- Rahayu, Cici. 2011. *Pengaruh Audit kinerja Sektor Publik dan Pengawasan fungsional terhadap Akuntabilitas Publik*. Skripsi. UNIKOM. Bandung.
- Revrisond Baswir. (1999), **Akuntansi Pemerintahan Indonesia**, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2008 Tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

- Sadeli, Dadang. 2008. *Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan Implikasinya Kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah*. UPI. Vol. 10, No. 2. Agustus. Hlm. 101-111.
- Sjamsiar. 2006. *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*. Manggaukang Raba
- Soleman, Rusman. 2007. *Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. *Disertasi*. Unpad.
- Surya, An Nissa Sumunar. 2004. *Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance*. Skripsi. Universitas Padjadjaran.
- Thompson, F.; dan L. R. Jones. 1986. *Controllershship in the Public Sector*. *Journal of Policy Analysis and Management*. 5(3): 547-571.
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Tanggung jawab keuangan Negara.
- Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Wasistiono, Sadu. 2010. *Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah*. Bandung : Fokusmedia.

